

STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR DALAM MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Ni Putu Ayu Yudanti¹⁾, I Putu Dharmanu Yudarta²⁾, Juwita Pratiwi Lukman³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 2025

Revised March 2025

Accepted March 2025

Available online March 2025

Email:

ayuyudanti2003@gmail.com¹⁾,

p.dharmanu@unud.ac.id²⁾,

juwitapratiwilukman@unud.ac.id³⁾



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

The WBK and WBBM predicates are given to a work unit that has passed the standardization. This research aims to determine the strategy of the Denpasar Immigration Office in maintaining the title of Corruption Free Area (WBK) and Clean Serving Bureaucratic Area (WBBM). The research method is qualitative descriptive and data collection methods in the form of interviews, observation and documentation. The research results show that the implemented strategy has been able to maintain the WBK and WBBM predicate but still needs to be optimized. There are problems in the form of technology, infrastructure and human resource management. The strategic recommendations from SWOT Analysis: (1) reinforce the consistency of procedures to maintain IKM (SO), (2) increasing maintenance of digitalization systems by a collaboration with private sector (WO), (3) reinforce work system procedures to avoid corruption (ST), and (4) optimizing digital systems with high security (WT). This research recommends strengthening procedures, improving facilities and optimizing digital-based systems.

Keywords: Strategy, Immigration Office, Corruption Free Area, Clean Serving Bureaucratic Area, Denpasar City

Abstrak

Predikat WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan terhadap sebuah satuan kerja yang telah melewati standarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang terlaksana sudah dapat mempertahankan predikat WBK dan WBBM namun masih perlu dioptimalkan. Terdapat kendala berupa permasalahan teknologi, infrastruktur dan manajemen sumber daya manusia. Rekomendasi strategi dari analisis SWOT, yaitu: (1) memperkuat konsistensi prosedur untuk mempertahankan IKM (SO), (2) meningkatkan pemeliharaan sistem digitalisasi bersama pihak swasta (WO), (3) memperkuat prosedur sistem kerja untuk menutup celah korupsi (ST), dan (4) optimalisasi sistem digital dengan keamanan tinggi (WT). Penelitian ini merekomendasikan penguatan prosedur, peningkatan sarana-prasarana dan optimalisasi sistem berbasis digital.

Kata Kunci : Strategi, Kantor Imigrasi, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Kota Denpasar

PENDAHULUAN

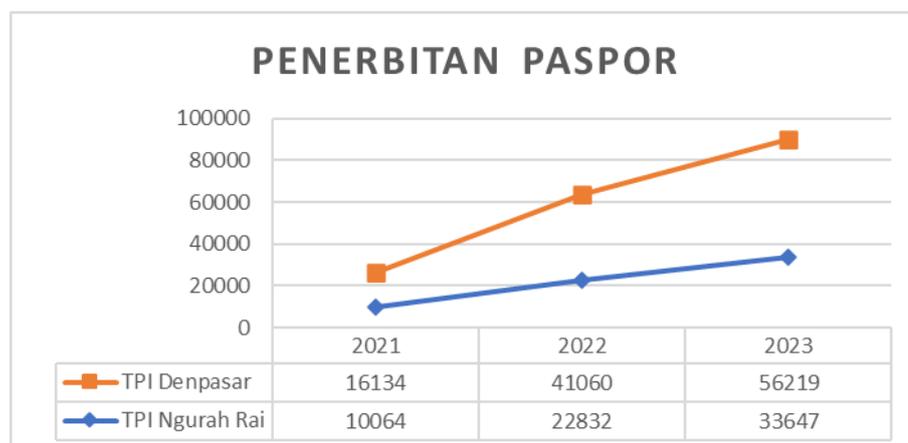
Korupsi, kolusi dan nepotisme yang sering disebut KKN merupakan praktik pelanggaran hukum yang menguntungkan kepentingan pribadi tetapi merugikan kepentingan umum. Korupsi adalah tindakan tidak baik seperti penggelapan uang, menerima sogokan uang, dan lainnya (Sofyanoor, 2022). Tidak menutup kemungkinan korupsi dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara karena sebagian besar kasus korupsi tidak jauh dari lingkup kekuasaan, hirarki, birokrasi dan juga pemerintahan. Pelayanan publik adalah seluruh aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan publik sebagai wujud memenuhi kebutuhan publik yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2007). Pelayanan publik merupakan wujud dari tugas pemerintah kepada masyarakat untuk melayani rakyat dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kasus korupsi yang dilakukan oleh para birokrat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Bentuk korupsi yang memiliki potensi terjadi di lingkungan birokrasi yakni suap, pemerasan, gratifikasi, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan jabatan dan lainnya.

Masih maraknya aktivitas korupsi yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk memutar otak dalam hal memberantas dan memutuskan rantai pelaksanaan korupsi terutama yang terjadi di lingkup pemerintahan dan dilakukan oleh para birokrat. Upaya yang dicoba pemerintah untuk mengatasi problematika tersebut yakni dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memperoleh predikat WBK pada tahun 2018 serta predikat WBBM pada tahun 2020 dan 2022, predikat dari Kementerian PAN dan RB ini menjadikan Kanim Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknik yang memperoleh predikat WBBM selama dua tahun pada lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (bali.kemenkumham.go.id, 2024).

Mengemban predikat yang menjadi incaran para instansi pemerintahan tentunya menyebabkan tekanan pekerjaan yang diterima oleh para pegawai juga lebih besar, pegawai akan didesak untuk melakukan tupoksinya secara maksimal. Disamping itu, kinerja pegawai juga perlu diperhatikan mengingat Kanim Denpasar memiliki pemohon lebih banyak daripada Kanim Kelas I lainnya. Tekanan kerja yang tinggi harus diatasi oleh para pegawai guna menghasilkan kinerja yang baik serta memberikan pelayanan terbaik secara berkualitas dan optimal kepada publik karena hal ini juga berpengaruh pada penilaian predikat WBK/WBBM.

Jumlah Penerbitan Paspor RI Tahun 2021-2023



Sumber : LKJIP 2021-2023 Kanim Ngurah Rai dan Website imigrasidenpasar.kemenumham.go.id

Strategi yang telah dilakukan sebelumnya yakni dengan meluncurkan beberapa inovasi pelayanan baru diantaranya Eazy Paspor dan Ide-Bisa Tu. Eazy Passport merupakan pelayanan publik berupa layanan pembuatan paspor yang pelaksanaannya bertempat di luar kantor dengan cara mendatangi tempat pemohon dengan mobil layanan paspor keliling (Iftitah dkk., 2023). Ide-Bisa Tu merupakan singkatan dari pelayanan Imigrasi Denpasar Bikin Paspor Hari Sabtu. Kedua inovasi ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kepada publik terutama dalam hal pembuatan paspor.

Selain itu, Kanim Denpasar melakukan penguatan *hospitality* oleh pegawai kepada masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan APOA. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kanim Denpasar selalu berada pada kategori "sangat baik" meski adanya peningkatan nilai angka penilaian, hal ini mengharuskan Kanim Denpasar untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena masih adanya beberapa keluhan dari serta masih perlunya peningkatan petugas yang informatif kepada masyarakat. Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas diperlukan adanya perubahan serta perbaikan yang berdampak kepuasan bagi masyarakat (Safitri dkk., 2022).

Perolehan predikat sebanyak dua kali dibarengi dengan pelayanan yang ada dapat menghasilkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dan strategi yang dijalankan berupa : (1) Tingginya tekanan kerja terhadap pegawai; (2) Kolaborasi antar komponen dalam menyukseskan strategi mempertahankan predikat WBK/WBBM; (3) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintahan; dan (4) Keterkaitan pelayanan terhadap penilaian WBK/WBBM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah upaya pengumpulan data yang berlandaskan pada latar alamiah (David Williams, 1995). Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis dan teoritis, atau menggambarkan suatu fenomena kejadian atau suatu peristiwa sosial yang dilakukan secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena ingin mendeskripsikan permasalahan serta fenomena yang terjadi secara rinci. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui strategi kantor imigrasi dalam mempertahankan predikat prestasi yang dimilikinya.

Pada penelitian ini dipergunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berasal langsung dari sumber, lalu diberikan kepada pengumpul data yakni peneliti (Sugiyono, 2019). Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara sekaligus melaksanakan observasi. Data sekunder didapatkan dalam bentuk dokumentasi serta keterangan lain termasuk gambaran umum, tempat penelitian, struktural organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang mampu memberikan informasi kepada penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teknik analisis data berupa teknik analisis SWOT dari Freddy Rangkuti (2021) yang mencakupi Strengths, Weakness, Opportunities, serta Threats. Analisis SWOT berguna untuk mamaksimalkan kekuatan dan peluang, dengan meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Konsep SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Faktor Internal

- a. Strength (Kekuatan) merupakan kekuatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar miliki. Dengan menggunakan kekuatan, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dapat dikembangkan menjadi lebih kuat dengan begitu akan mampu bertahan dan mampu menyempurnakan strategi selanjutnya.
- b. Weakness (Kelemahan) merupakan faktor yang tidak menguntungkan, melemahkan dan bahkan merugikan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Faktor inilah penyebab suatu organisasi memiliki keterbatasan atau keterampilan yang tidak sebanding dengan pesaingnya.

2. Evaluasi Faktor Eksternal

- a. Opportunities (Peluang) adalah peluang terkait pelaksanaan pengembangan dimasa depan, hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku, atau kondisi lingkungan sekitar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
- b. Threats (Ancaman) adalah hal yang akan datang dan menyebabkan kerugian bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, contohnya seperti kurangnya inisiatif pegawai dalam mengimplementasikan strategi, atau kurangnya peran masyarakat terhadap pengevaluasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengenai pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan syarat WBK/WBBM.

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

Penelitian oleh Ika Damayani, Aris Tri Haryanto dan Damayanti Suhita pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021.”

Penelitian oleh I Made Dody Sutrisna pada tahun 2024 berjudul “Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat.”

Penelitian oleh Wihardiasty Sekar Kinasih dan Sujianto (2022) dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru.”

Susilawati, Eny Inti Suryani dan Sindi Sanora (2022) berjudul “SWOT Strategy Analysis in Improving the Quality of Public Services During the Covid-19 Pandemi (Study at Pekon Sopyono, Wonosobo District, Tanggamus Regency).”

Fauzih, Indira Yuana, Nofal Supriaddin dan Kartini Suryaningsih (2023) dengan judul “Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Pada Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Kendari.”

Penelitian oleh Waska Warta, Rifqi Zaeni Achmad Syam, dan Tansah Rahmatullah (2024) dengan judul “*School Reputation Management for Institutional Sustainability and Achievement of Excellent Predicate.*”

Persamaan dalam penelitian ini dan terdahulu yakni topik pembahasan berkaitan dengan mempertahankan predikat pada instansi pemerintahan dengan analisis SWOT serta kesamaan metode dan jenis penelitian. Keterbaruan dari penelitian ini merupakan persepektif baru mengenai mempertahankan predikat WBK/WBBM di instansi pemerintahan dengan mengkaji lebih kompleks.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebuah predikat sebagai prestasi diperuntukkan satuan kerja yang telah memenuhi persyaratan manajemen perubahan, penata tata laksana, penata sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jika unit kerja yang diajukan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM telah dipilih, lalu tahapan lanjutannya yakni melakukan pembentukan komponen pengungkit dan komponen hasil.

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ialah predikat sebagai simbol prestasi yang dinobatkan terhadap sebuah satuan kerja yang telah melewati standarisasi syarat manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik serta penguatan akuntabilitas kinerja. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat diserahkan pada sebuah satuan kerja jika sudah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga dapat disebut bahwa WBBM merupakan predikat dengan skor lebih tinggi dari WBK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Pelabuhan Laut Benoa. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terletak di tengah kota Denpasar yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 3 Niti Manadala, Renon, Denpasar. Kantor Imigrasi Denpasar telah mempertahankan predikat WBK dan WBBM dengan melengkapi aspek persyaratan penilaian dari PERMENPAN-RB nomor 10 tahun 2019. Aspek yang dinilai dapat dibagi menjadi dua yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit pada aspek penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu ditingkatkan karena masih adanya *error* pada aplikasi. Pengembangan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan guna menghindari kesenjangan kompetensi antar pegawai. Aspek penilaian yang perlu dipertahankan penguatan akuntabilitas yakni pemberian reward dan punishment yang terlaksana.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mmemberikan pelayanan dalam 2 (dua) kategori, yakni pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bagi WNI yakni Pelayanan Paspur. Selama tahun 2024, Kanim Denpasar telah menyelesaikan pelayanan publik dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan oleh tingginya jumlah penerbitan paspor yang diikuti oleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang sangat baik. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga memberikan pelayanan kepada Warga Negara Asing (WNA) berupa pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, surat keterangan (affidavit) kewarganegaraan ganda terbatas, pengembalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen keimigrasian.

Grafik 1. Statistik Penerbitan Paspor



Sumber: <https://imigrasidenpasar.kemenumham.go.id/>

Analisis Hasil Temuan

Keterkaitan dengan Manajemen Strategi

A. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan kegiatan memantau, memahami dan mengamati lingkungan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek. Keterkaitan antara indikator ini dengan hasil temuan yakni Kantor Imigrasi tentunya melakukan *screening* dengan mengidentifikasi lingkungan, dipahami isu lalu memperhatikan peluang dan ancaman yang ada dari aspek internal ataupun eksternal. Kekuatan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Denpasar yaitu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Aspek yang menjadi kelemahan dari Kantor Imigrasi Denpasar adalah masih kerap terjadi *error* pada aplikasi M-paspor yang menghambat, sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan. Peluang yang terbuka bagi Kantor Imigrasi Denpasar yakni adanya peluang untuk dapat bersinergi bersama pihak atau instansi lain karena dapat melakukan diskusi dan memperoleh opsi solusi permasalahan yang kompleks. Ancaman yang mereka hadapi yakni faktor teknologi berupa ancaman *cyber* seperti peretasan data yang mengancam keamanan data penting dapat mengancam instansi serta kepercayaan masyarakat.

B. Formulasi Strategi

Formulasi strategi mencakup menetapkan visi instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengembangkan strategi dan berpedoman pada kebijakan. Strategi Kanim Denpasar berfokus kepada kualitas SDM yang dimiliki dengan melakukan *brainstorming* ketika rapat sehingga bisa bertukar pikiran sekaligus secara koordinasi dan komunikasi. Kanim Denpasar berpedoman kepada PERMENPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 yang selanjutnya dibentuk kebijakan secara internal guna berfokus kepada mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Kantor Imigrasi Denpasar telah melakukan formulasi strategi dengan melibatkan visi dan misi untuk menghasilkan strategi yang maksimal, konsisten dan sesuai etik dengan tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Strategi ini perlu konsisten pengembangannya sehingga kesempatan bagi ancaman merugikan dapat dicegah sebelum terjadi kerugian yang besar.

C. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Kantor Imigrasi melakukan beberapa aktivitas dalam mempertahankan predikat WBK dan WBBM yang dilakukan melalui program, inovasi dan prosedur. Kantor Imigrasi Denpasar memiliki beberapa inovasi program yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Strategi yang diimplementasikan berupa inovasi seperti IDE-Cemerlang (Imigrasi Denpasar Cepat Merespon Pelanggan), IDE-Punapi (Imigrasi Denpasar

Pelayanan Unggulan Pemohon Asing Prioritas), serta IDEBisaTU (Imigrasi Denpasar Bikin Paspor Hari Sabtu). Pelaksanaan program kerja Kanim Denpasar menjalankan prosedur sesuai standar dengan dibarengi oleh sikap 3S (senyum, salam, dan sapa). Anggaran pada Kanim Denpasar diurus oleh kelompok kerja (pokja) keuangan yang diatur pada SK Tim ZI. Realisasi dari anggaran ini dapat dilihat melalui LKJIP setiap tahunnya. Kanim Denpasar juga memiliki Standar Pelayanan yang diatur pada Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Nomor W20.IMI.IMI.2-UM.01.01-476 Tahun 2024 serta Standar Operasional Prosedur salah satunya adalah SOP Nomor Nomor IMI-0003.GR.01.02 Tahun 2022 Tentang Penerbitan Baru dan Penggantian Paspor Biasa Melalui M-Paspor

D. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian merupakan proses tahapan terakhir berupa monitoring atau pengawasan dari kinerja yang sesungguhnya dengan membandingkan kepada kinerja yang diharapkan dalam sebuah instansi. Tahapan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kanim Denpasar adalah rapat evaluasi rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali (triwulan). Evaluasi dari masyarakat tidak dapat disepelekan sebagai pihak penerima pelayanan di lapangan, oleh karena itu Kanim Denpasar membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat menyuarakan keluhan ataupun kendala berupa pengaduan.

Hasil Analisis SWOT

Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Internal

Berdasarkan hasil temuan, identifikasi dan kajian pada penelitian ini menunjukkan masih adanya faktor lingkungan dari eksternal dan juga internal yang belum teridentifikasi sehingga faktor peluang, ancaman, kekuatan sekaligus kelemahan belum dapat dikelola secara optimal oleh Kantor Imigrasi Denpasar. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta kajian yang telah dilakukan terkait lingkungan internal dan eksternal, berikut beberapa faktor terkait:

A. Kekuatan

1. Sistem pelayanan dan inovasi berbasis digitalisasi.
Pelayanan di Kanim Denpasar telah berbasis digitalisasi seperti pendaftaran secara daring melalui aplikasi M-paspor termasuk inovasi pembuatan paspor pada hari sabtu. Sistem pelayanan menggunakan nomor antrean secara digital dengan melakukan pindai pada barcode bukti pendaftaran online.
2. Sumber Daya Manusia berkompeten dengan profesionalisme tinggi.
SDM pada Kanim Denpasar merupakan pegawai berkompeten dengan profesionalisme tinggi ditunjukkan dengan IKM yang tinggi menyatakan puasanya masyarakat terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, pegawai juga melaksanakan tupoksi secara disiplin dan tepat waktu sebagai wujud profesionalisme.
3. Sistem kerja dengan prosedur yang jelas.
Pelaksanaan pelayanan serta tugas masing-masing pegawai diatur oleh standar pelayanan serta SOP yang disepakati dan berlaku sehingga pegawai dapat bekerja dengan fokus sesuai dengan tugas dan prosedur.

B. Kelemahan

1. Kendala sistem teknologi berupa kendala aplikasi.
Sistem pelayanan berbasis digitalisasi tentunya memiliki kelemahan berupa kendala aspek teknologi seperti permasalahan jaringan dan permasalahan *server error*. Kendala ini menghambat pelayanan karena aplikasi pelayanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.
Infrastruktur perlu dibarengi peningkatannya sejalan dengan pelayanan yang diberikan semakin banyak, bertambahnya jumlah pemohon serta inovasi tentu

mempengaruhi frekuensi kedatangan masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana seperti peningkatan ruang tunggu dan penambahan speaker pemanggil nomor antrean.

3. Beban stress pegawai.

Pegawai yang terbiasa bekerja dengan budaya kerja lama kini harus berubah sejalan dengan adanya inovasi baru seperti pembuatan paspor pada hari sabtu sehingga mengharuskan pegawai bekerja pada akhir pekan dapat memicu beban stress pada pegawai dan mempengaruhi kualitas SDM serta mengancam kualitas pelayanan yang diberikan.

C. Peluang

1. Bekerjasama dengan Non-Governmental Organization yang berfokus pada anti korupsi.

Bekerjasama dengan NGO dapat membuka wawasan pegawai terkait anti korupsi dengan melakukan tukar pikiran dengan NGO. Kanim Denpasar dapat menjadikan NGO sebagai pihak eksternal yang turut mengawasi tindakan korupsi di lingkungan kantor.

2. Bekerjasama dengan swasta perihal sistem teknologi keamanan data.

Pelayanan dengan berbasis digitalisasi tentu tidak terlepas dari isu keamanan data, Kanim Denpasar dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan keamanan data dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman dan ahli pada bidangnya sehingga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat mengenai keamanan data mereka.

3. Peningkatan inovasi pelayanan guna mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kanim Denpasar dapat mengkaji lebih lanjut feedback yang diberikan masyarakat terkait permasalahan mereka dan memberikan solusi melalui inovasi baru yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Kepuasan masyarakat akan terwujud melalui IKM jika inovasi yang ada membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi selama memperoleh pelayanan publik.

D. Ancaman

1. Ancaman keamanan data dan serangan siber.

Sistem pelayanan berbasis teknologi tentunya perlu adanya keamanan tinggi mengingat berkas pelayanan mencakup data penting masyarakat dan kantor sehingga perlu adanya keamanan tinggi untuk mencegah terjadinya ancaman serangan siber seperti kebocoran data dan hacking.

2. Adanya upaya tindak korupsi berupa suap dari pihak eksternal.

Pihak eksternal atau oknum yang tidak mau mengikuti prosedur yang berlaku tentu akan mengupayakan adanya tindakan korupsi seperti suap terhadap pegawai untuk memberikan perlakuan khusus dalam pelayanan kepada suatu pihak, hal ini akan menyebabkan adanya diskriminasi dan mengancam integritas kantor.

3. Permohonan paspor yang melebihi kapasitas.

Permohonan paspor yang melebihi kapasitas akan memicu beban kerja yang berlebih dari pegawai dan menyebabkan risiko atas kesalahan administrasi yang merugikan masyarakat dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Analisis SWOT Berdasarkan Matriks

Berdasarkan hasil analisis identifikasi lingkungan eksternal serta internal dari instansi, maka dirumuskan strategi yang dapat menjadi strategi alternatif. Adapun matriks SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut:

INTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pelayanan dan inovasi berbasis digitalisasi. 2. Sumber Daya Manusia berkompeten dengan profesionalisme tinggi. 3. Sistem kerja dengan prosedur yang jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala sistem teknologi berupa kendala aplikasi. 2. Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. 3. Beban stress pegawai.
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan <i>Non-Governmental Organization</i> yang berfokus pada anti korupsi. 2. Bekerjasama dengan swasta perihal sistem teknologi keamanan data. 3. Peningkatan inovasi pelayanan guna mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem digitalisasi dengan bekerjasama bersama swasta. 2. Memanfaatkan SDM yang berkompeten untuk melakukan kerjasama dengan NGO. 3. Mempertahankan konsistensi prosedur untuk mempertahankan IKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemeliharaan sistem melalui kerjasama dengan swasta yang ahli pada bidangnya. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempertahankan kenyamanan dan kepuasan masyarakat. 3. Melakukan kegiatan non-formal bersama NGO untuk meningkatkan antisipasi korupsi pihak internal.
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman keamanan data dan serangan siber. 2. Adanya upaya tindak korupsi berupa suap dari pihak eksternal. 3. Permohonan paspor yang melebihi kapasitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kompetensi SDM untuk memperkuat keamanan siber. 2. Memperkuat prosedur sistem kerja untuk menutup adanya upaya korupsi. 3. Optimalisasi antrean digital dengan mendistribusikan jam kedatangan pemohon secara rata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sistem digital dengan keamanan tinggi. 2. Membangun fasilitas memadai sehingga dapat meningkatkan kapasitas permohonan. 3. Meningkatkan integritas pegawai untuk tetap bekerja sesuai kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik empat prioritas strategi strategis yang terbagi menjadi strategi SO (strength-opportunity), strategi WO (weakness-opportunity), strategi ST (strength-threat), dan strategi WT (weakness-threat). Berikut merupakan strategi alternatif dimasa mendatang:

1. Strategi SO

1. Meningkatkan sistem digitalisasi dengan bekerjasama bersama swasta.
Sistem digitalisasi berupa pendaftaran dan inovasi dapat ditingkatkan dengan melakukan kerjasama bersama pihak swasta yang lebih berpengalaman pada bidang tersebut. Pihak swasta yang berfokus pada IT akan membantu sistem digitalisasi berjalan lebih optimal.
2. Memanfaatkan SDM yang berkompeten untuk melakukan kerjasama dengan NGO.
Memiliki SDM yang berkompeten dan professional dapat membangun peluang untuk bekerjasama bersama NGO dalam perihal kegiatan anti korupsi. NGO yang lebih berkompeten dalam pelaksanaan anti korupsi dapat menambah wawasan serta membantu menganalisis terkait adanya celah upaya tindakan korupsi yang terdapat pada Kanim Denpasar.
3. Mempertahankan konsistensi prosedur untuk mempertahankan IKM. Prosedur yang dilaksanakan secara konsisten akan menjadikan pelayanan yang prima sehingga menghasilkan kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat dapat dinilai melalui survey kepada masyarakat, kepuasan ini dapat dipertahankan melalui hasil nilai IKM.

2. Strategi WO

1. Meningkatkan pemeliharaan sistem melalui kerjasama dengan swasta yang ahli pada bidangnya.
Pemeliharaan sistem akan mengurangi kendala pada aplikasi seperti perbaikan error dan bug melalui bekerjasama bersama swasta yang memiliki kompetensi level tinggi pada bidang IT.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempertahankan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana seperti peningkatan ruang tunggu dan penambahan sarana berupa speaker pada ruang tunggu luar akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mempengaruhi nilai IKM.
3. Melakukan kegiatan non-formal bersama NGO untuk meningkatkan antisipasi korupsi pihak internal.
Kerjasama dengan NGO dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan non-formal sehingga penyampaian pencegahan anti korupsi kepada pegawai lebih efektif. Kegiatan non-formal dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menerima wawasan anti korupsi sekaligus refreshing sehingga dapat menghasilkan energi baru yang lebih baik dalam kinerja.

4. Strategi ST

1. Memanfaatkan kompetensi SDM untuk memperkuat keamanan siber.
SDM yang berkualitas dan berkompeten pada bidang IT dapat meningkatkan keamanan siber guna menghindari terjadinya kebocoran data serta dapat mengatasi adanya ancaman siber yang dapat menghambat kinerja.
2. Memperkuat prosedur sistem kerja untuk menutup adanya upaya korupsi.
Prosedur yang ketat dan kuat akan menutup adanya kesempatan untuk terjadi tindakan korupsi yang masuk dalam pelayanan kepada masyarakat. Prosedur dibarengi dengan pemberian sanksi bagi pelanggar dan reward bagi pegawai yang konsisten tentu berpengaruh baik untuk menutup celah upaya korupsi.
3. Optimalisasi antrean digital dengan mendistribusikan jam kedatangan pemohon

secara rata.

Sistem antrean berbasis digital dapat dioptimalkan dengan membatasi kedatangan pemohon pada jam tertentu melalui distribusi jam kedatangan per hari. Misalnya, sistem dapat membatasi kedatangan pemohon pada jam 08.00-10.00 sejumlah 50 orang.

5. Strategi WT

1. Mengoptimalkan sistem digital dengan keamanan tinggi.
Sistem digitalisasi berupa inovasi pelayanan dan data internal perlu dioptimalkan dan ditingkatkan keamanan selama penggunaannya sehingga mengurangi terjadinya ancaman siber.
2. Membangun fasilitas memadai sehingga dapat meningkatkan kapasitas permohonan. Peningkatan infrastruktur berupa pengembangan ruang tunggu atau penambahan loket akan menjadi solusi dari tingginya demand permohonan paspor. Tingginya permohonan paspor dapat diatasi dengan penambahan kapasitas perhari jika infrastruktur dikembangkan.
3. Meningkatkan integritas pegawai untuk tetap bekerja sesuai kebijakan yang berlaku. Pegawai yang bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan terhindar dari upaya tindakan suap yang dapat mengganggu dinamisme kinerja secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan stress pada pegawai.

REKOMENDASI

Strategi yang dihasilkan diperoleh dari analisis SWOT yang sudah dilakukan. Berikut merupakan beberapa rumusan strategi yang dapat dikaji ulang dan dijadikan standar minimal oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam mengformulasikan alternatif strategi bagi masa depan, yakni:

1. Strategi yang diciptakan dari memanfaatkan kekuatan untuk menghadirkan peluang (SO), yaitu mempertahankan konsistensi prosedur untuk mempertahankan IKM. Prosedur yang ada perlu dipertahankan guna dijadikan acuan bagi para pegawai untuk memberikan pelayanan sesuai standar secara konsisten sehingga tidak terjadi adanya pengaduan terkait perbedaan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat. Prosedur mengatur standarisasi pelayanan termasuk tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan rasa puas dari masyarakat penerima pelayanan.
2. Strategi yang diciptakan bertujuan meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO), yaitu meningkatkan pemeliharaan sistem melalui kerjasama dengan swasta yang ahli pada bidangnya. Pemeliharaan sistem perlu dilakukan mengingat penggunaan aplikasi M-paspor sangat krusial berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kanim Denpasar, dikarenakan aplikasi kerap terjadi kendala maka membangun kerjasama dengan pihak swasta yang sudah bekecimpung pada bidang IT akan membantu dan menyempurnakan keamanan sekaligus memelihara sistem yang ada dengan baik dan dapat mencegah terjadinya error selama penggunaan aplikasi oleh masyarakat.
3. Strategi yang diciptakan untuk memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST), yaitu memperkuat prosedur sistem kerja untuk menutup adanya upaya korupsi. Prosedur sistem kerja yang ketat dan kuat akan menutup kesempatan atau celah adanya upaya tindakan KKN berupa korupsi melalui suap. Permohonan paspor dengan demand tinggi tentunya dapat menarik beberapa masyarakat untuk melakukan suap dengan mengharapkan mendapatkan perlakuan istimewa dari pegawai. Hal ini bertentangan dengan predikat WBK dan WBBM yang diemban, sehingga penguatan prosedur akan menekan probabilitas terjadinya tindakan suap.
4. Strategi yang diciptakan untuk meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman (WT),

yaitu mengoptimalkan sistem digital dengan keamanan tinggi. Sistem digital Kanim Denpasar dapat dikatakan aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan publik karena seluruh data masyarakat serta data kantor tersimpan dalam sistem digital yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Data-data penting ini perlu dilindungi dengan keamanan sistem digital yang tinggi untuk menghindari terjadinya kebocoran data akibat penyerangan siber. Kebocoran data akan sangat menghambat Kanim Denpasar dalam mempertahankan predikatnya karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian Strategi Kantor Imigrasi Denpasar dalam Mempertahankan Predikat WBK dan WBBM berdasarkan kepada teori manajemen strategi oleh Wheelen dan Hunger dan analisis SWOT menghasilkan bahwa strategi yang terlaksana sudah mampu mempertahankan predikat WBK dan WBBM, namun masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat hambatan. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki sekaligus ditingkatkan sesuai dengan indikator teori di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan, indikator ini terpenuhi dengan hidupnya sinergi antara lingkungan eksternal dan internal. Kantor Imigrasi Denpasar sudah melakukan identifikasi dari faktor peluang, ancaman, kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Faktor peluang dan ancaman yang dimiliki dipetakan dan didiskusikan guna memperoleh solusi dengan merancang strategi berupa program dan inovasi dari kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan yang ada sehingga mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Formulasi Strategi, indikator ini terpenuhi oleh Kantor Imigrasi Denpasar karena seluruh lapisan pegawai melakukan brainstorming sehingga dapat bekerjasama dalam menentukan strategi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan tetap berpedoman pada visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, Kantor Imigrasi Denpasar memiliki kebijakan yang menjadi pedoman serta mengatur berjalannya pelayanan dan tupoksi pegawai sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalan yang sesuai dan tidak menyimpang.
3. Implementasi Strategi, indikator ini terpenuhi dengan terlaksananya implementasi strategi yang sudah dirancang dengan melaksanakan inovasi yang dianggap menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah menjalankan pelayanan sekaligus inovasi yang disusun sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Salah satu contoh inovasi yang menjadi solusi masyarakat adalah program IDEBisaTu yang memberikan masyarakat kesempatan memperoleh layanan diluar hari kerja.
4. Evaluasi dan Pengendalian, indikator ini berhasil dipenuhi oleh Kantor Imigrasi Denpasar dengan cara melaksanakan rapat evaluasi triwulan yakni 3 bulan sekali. Rapat evaluasi ini membahas serta mendiskusikan permasalahan yang muncul lalu mencari solusi. Selain itu, Kantor Imigrasi Denpasar juga melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah pengaduan sehingga masyarakat dapat ikut serta mengevaluasi, mengkritik dan memberikan saran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, berikut merupakan beberapa saran yang penulis berikan untuk dapat dikaji dan diperhatikan oleh Kantor Imigrasi Denpasar. Adapun saran-saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Kantor Imigrasi Denpasar dapat meningkatkan inovasi dan program yang sudah ada dengan memperhatikan pengaduan dan feedback dari masyarakat sehingga inovasi dan program

yang ada dapat berjalan optimal dan maksimal. Selain itu, Kanim Denpasar juga harus waspada terkait ancaman teknologi karena akan menyebabkan kerugian yang begitu besar jika hal-hal serupa terjadi dan membahayakan berbagai pihak.

2. Masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan yang diberikan oleh Kanim Denpasar tentunya harus berpartisipasi aktif dalam memberikan review ataupun kritik dan saran yang membangun bagi Kanim Denpasar yang dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Masyarakat juga telah diberikan akses transparansi penuh mengenai pelayanan di media sosial dan website Kanim Denpasar. Oleh sebab itu, ada baiknya masyarakat tetap mengajukan permohonan pelayanan secara jujur dan mengikuti prosedur yang berlaku, tanpa adanya tindakan KKN.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian serupa dapat menganalisis secara mendalam dari masukan yang diberikan masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat ataupun data pada bidang pengaduan secara langsung. Selain itu, sebaiknya mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bungin, M. B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- David, F. R. (2011). *Strategic Management Concepts And Cases*. Prentice hall.
- Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82(8), 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>
- Hunger, J. D & Wheelen, T. L. (2020). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. 1-55.
- _____. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nawawi, H. H. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rangkuti, F. (2021). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Amelia, A. (2022). *Analisis Tentang Efektivitas Predikat Wilayah Bebas Korupsi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Z., & Suryaningsih, S. (2022). Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2253-2264.
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Bbws Pemali Juana Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25-42.
- Kinasih, W. S. K. W. S., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI



(Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 104-120.

Mahendra, P. D. A. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Permohonan Paspor Melalui Pemanfaatan Aplikasi M-Paspor (Studi Kasus: Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar). *Skripsi*. Denpasar: Universitas Udayana.

Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468-476.

Rompas, D. J., Pioh, N. R., & Monintja, D. K. (2023). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbm) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Governance*, 3(1).

Sofyanoor, A. . (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.

Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 127-135.

DOKUMEN PEMERINTAHAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Ngurah Rai Tahun 2021-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Tahun 2022-2024.

Standar Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Tahun 2024.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Nomor W20.IMI.IMI.2-OT.03.01-1056 Tahun 2024 Perihal Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

WEBSITE

Humas Kemenhumkam Bali. (2024). Menjaga Predikat WBBM: Monitoring Dan Evaluasi Di Kantor Imigrasi Denpasar. Diakses pada 19 November 2024 dari <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-utama/menjaga-predikat-wbbm-monitoring-dan-evaluasi-di-kantor-imigrasi-denpasar>

Imigrasi Denpasar. (2025). Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024. Diakses pada 19 Februari 2025 dari <https://www.instagram.com/imigrasidenpasar/>